

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BEKERJA  
DISEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI  
UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
JO UU 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA)**

**TOMMY SUNJOTO, SH, A.2021131009**

Pembimbing I : Prof. Dr.H. Garuda Wiko, SH. MSi

Pembimbing II : Drs. Arief Rahman, MSi. MH

**ABSTRACT**

This thesis focuses on the legal protection of child laborers working in the oil palm sector in terms of Act No. 13 of 2003 on Labor jo Law No. 23 of 2002 on the Protection of Anak. Dari study authors using sociological obtained legal research conclusions: 1) .bahwa conditions of children working in the palm oil sector if it is associated with article 69 paragraph 2 of Law No. 13 Year 2003 jo Law No. 23 of 2002 on Child Protection, everything is not met. It means that there are deviations were made by the company to employ children in the context of the law. These conditions would have to be protected from the local government Kubu Raya, these children should not be allowed to work, because of the age of the child is still under age should sit in school. The local government seems less serious attention to child labor. It can be seen from the lack of real action from the government, either in the form of cessation of the company's operations or revocation of business licenses of plantation and furthermore no effort of the local government Kubu Raya to attract the children of plantation companies where children The bekerja.2). That the factors that cause children to work in oil palm plantations is the Poverty and Economic Factors; Socio-cultural factors; Factors Pengawasan.3 Education). That the steps taken by the Department of Labor and Transmigration the summons against children and the elderly. The summoning of the Oil Palm. These two steps being very vain, because the repressive actions of the Department of Labor and Transmigration Kubu Raya absolutely nothing. Manpower and Transmigration Kubu Raya just give directives alone, which is more imbaun. This condition would not be a deterrent for companies to keep employing child labor. The suggestions are 1). Preventive efforts should be made law in the form of labor inspection and the continuous efforts of repressive

laws such legal actions can provide a real deterrent effect for oil palm plantation company which employs anak.2). Highway district government camp must make a breakthrough in the form of policies that can attract children who work to return to school.

## **ABSTRAK**

Tesis ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis di peroleh kesimpulan : 1). bahwa kondisi anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semuanya tidak terpenuhi. Artinya ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dalam konteks hukum. Kondisi ini tentu harus mendapat perlindungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja, karena usia anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya duduk dibangku sekolah. Pemerintah daerah tampaknya kurang memperhatikan secara serius terhadap pekerja anak ini. Hal ini, dapat dilihat dari tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penghentian operasional perusahaan ataupun pencabutan izin usaha perkebunan dan lebih jauh lagi tidak usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menarik anak-anak tersebut dari perusahaan-perusahaan perkebunan dimana anak tersebut bekerja.2). Bahwa faktor yang menyebabkan anak bekerja di perkebunan kelapa sawit adalah Faktor Kemiskinan dan Ekonomi ; Faktor Sosial Budaya; Faktor Pendidikan Pengawasan.3). Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Pemanggilan terhadap anak dan orang tua. Pemanggilan terhadap Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Dua langkah ini menjadi sangat sia-sia, karena tindakan-tindakan refresif dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya sama sekali tidak ada. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja, yang lebih bersifat imbaun. Kondisi ini tentu tidak menjadi efek jera bagi perusahaan untuk

tetap mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja. Saran-saran adalah 1). Harus dilakukan upaya hukum preventif berupa pengawasan ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan upaya hukum refresif berupa tindakan-tindakan hukum nyata yang dapat memberikan efek jera bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempekerjakan anak.2). Pemerintah daerah kabupaten kubu raya harus membuat terobosan berupa kebijakan yang dapat menarik anak-anak yang bekerja untuk kembali bersekolah.

## **A. Latar belakang Penelitian**

Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Mempawah di Propinsi Kalimantan Barat, dimana Struktur ekonomi kabupaten Kubu Raya didominasi sektor industri pengolahan, pertanian, dan sektor perdagangan dan jasa sedangkan potensi Sumber Daya Alam terdiri dari pertanian dan peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Pada Kegiatan perkebunan untuk komoditas dalam skala industri membudidayakan jenis komoditas antara lain karet, kelapa dan kelapa sawit. Khusus perkebunan kelapa sawit, pemilik modal yang menanamkan investasinya cukup banyak, terbukti dengan banyaknya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini.

Salah satu dampak positif dengan dibukanya perkebunan-perkebunan kelapa sawit tersebut yakni terserapnya tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, baik sebagai pekerja yang bekerja di perkatoran perusahaan maupun pekerja yang bekerja di lapangan sebagai pekerja atau buruh lapangan baik petugas pembersih lingkungan perkebunan, pekerja pemanen hasil buah kelapa sawit, pekerja pemungut kelapa sawit dan lain sebagainya. Meskipun demikian, dampak negatif dari banyaknya serapan tenaga kerja pada sektor perkebunan kelapa sawit tersebut, ternyata anak-anak juga menjadi pekerja.

Dalam konsep hukum anak di elaborasi sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi anak agar terbebas untuk melakukan pekerjaan sudah banyak disahkan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak dan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan pada tahun 2022 nanti Indonesia dicanangkan bebas pekerja anak, dalam upaya menghapus anak-anak bekerja yang belum pada waktunya. Selanjutnya surat kabar kompas meliris bahwa Indonesia memiliki 1,7 juta pekerja anak yang mayoritas bekerja di sektor informal. Dari jumlah tersebut, baru 63.055 anak yang ditarik dari pekerjaannya untuk dikembalikan ke sekolah sepanjang tahun 2008-2014. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), kantong pekerja anak yang cukup besar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Pekerja Anak Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker Budi Hartawan mengatakan, pekerja anak itu umumnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan serta konstruksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Surat kabar kompas, hari rabu 31 Desember 2014

Khusus di kabupaten Kubu raya terdapat 29 perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dari 29 perusahaan tersebut terdapat 38 pekerja anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Perkerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, pada prinsipnya sama seperti yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun orang tua seperti misalnya mengangkut tandan sawit, membersihkan areal perkebunan kelapa sawit dan sebagainya, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak.

Atas kondisi riil sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri KetenagaKerjaan dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta data-data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya mengenai banyaknya anak-anak yang masih bekerja dan dipekerjakan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah Peneltian**

Dari uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap para pekerja anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak –anak bekerja di perkebunan kelapa sawit.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu raya melihat pekerja anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

## **PEMBAHASAN**

## **1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Terhadap Para Pekerja Anak Yang Bekerja Di Perkebunan Kelapa Sawit.**

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa :

### **Pasal 68**

**Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.**

### **Pasal 69**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Jika ditelusuri, ternyata antara pasal 68 dan 69 sebenarnya terdapat ambivalensi dan sikap ambigu dari pembentuk undang-undang. Hal ini disebabkan, pada satu pasal dinyatakan di larang dan pada pasal lain diperkenankan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jika memang anak tidak diperkenankan untuk bekerja maka anak tidak boleh dipekerjakan dengan alasan dan persyaratan apapun. Hal ini di dasarkan, karena pada usia anak tidak boleh dibebani dengan berbagai macam pikiran yang dapat mempengaruhi fisik dan mental anak di kemudian hari.

Dalam realitas sosial sebagaimana pandangan dan pengamatan peneliti, jika anak telah bekerja dan bisa menghasilkan uang, maka mental anak berubah drastis. Anak tidak lagi memikirkan bagaimana hari depannya dalam arti, belajar dan dunia pendidikan menjadi terbengkalai dan lebih jauh kebanyakan menjadi putus sekolah. Pikiran mereka tertuju bagaimana untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus membantu beban orang tua.

Oleh karena itu, menjadi sangat tepat jika hak-hak anak dirumuskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran.
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya.
- g. Mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi.



- i. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri.
- j. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk bentuk pekerjaan terburuk.
- k. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak.
- l. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kondisi yang dibutuhkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, meliputi: <sup>3</sup>

1. Lingkungan yang bahagia dan sejahtera. Yang dimaksud adalah sepasang ayah hidup rukun dan bahagia dan sejahtera (harmonis) yang menjadi pelindung dan pembimbing anak. Yang memberikan kasih sayang dan dengan kondisi social ekonomi yang cukup kuat serta terciptanya antara manusia yang baik.
2. Pangan. Pangan harus cukup kualitas dan kuantitasnya, sebab kekurangan dalam bidang ini akan menghambat tumbuh-kembang anak.
3. Perumahan. Rumah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, halaman rumah cukup luas untuk ruang gerak yang bebas mengingat anak sangat aktif.

Norma hukum yang meliputi hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan suatu kebijakan guna melindungi anak dan terlaksananya norma tersebut pada tataran implementatif.

---

<sup>3</sup> Suherman.. Buku Saku Perkembangan Anak. Penerbit: Kedokteran EGC. 2000 Hal. 11

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa persoalan pekerja anak tidak saja menjadi persoalan lokal pada tingkat daerah, namun telah menjadi persoalan nasional. Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian,<sup>4</sup>dengan kata lain sepanjang dilakukan dengan proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif, namun yang dikhawatirkan adalah di lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.

Pada wilayah daerah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, masih terdapat dan dijumpai anak-anak yang bekerja pada bidang perkebunan pada sektor perkebunan kelapa sawit. Adapun perusahaan- perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya meliputi :

#### Daftar Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya

Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1. PT. Rezeki Kencana	Kec. Teluk Pakedai
2. PT. Mitra Aneka Rezeki	Kec. Teluk Pakedai
3. PT. Sintang Raya	Kec. Kubu
4. PT. Putra Lirik Domas	Kec. Rasau Jaya
5. PT. Nusa Jaya Perkasa	Kec. Sungai Raya
6. PT. Rajawali Jaya Perkasa	Kec. Sungai Raya
7. PT. Ichiko Agro Lestari	Kec. Terentang
8. PT. Palmdale Agroasia Lestari	Kec. Sungai Ambawang
9. PT. Bumi Perkasa Gemilang	Kec. Terentang
10. PT. Graha Agro Nusantara I	Kec. Sungai Raya
11. PT. Graha Agro Nusantara II	Kec. Sungai Raya
12. PT. Graha Agro Nusantara III	Kec. Sungai Raya

<sup>4</sup> Elfrianto, Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Jurnal Madani, Vol. 8 No.2, Juni 2007, Medan: UMSU, hlm 259

13. PT. Sawit Jaya Makmur	Kec. Sungai Raya
14. PT. Kusuma Alam Sari	Kec. Sungai Raya
15. PT. Aditya Agronindo	Kec. Sungai Raya
16. PT. Fajar Saudara Lestari	Kec. Batu Ampar
17. PT. Cipta Tumbuh Berkembang	Kec. Kubu
18. PT. Sumatra Unggul Makmur	Kec. Sungai Raya
19. PT. Hartono Plantation Indonesia	Kec. Sungai Raya
20. PT. Bumi Pratama Khatulistiwa	Kec. Kuala Mandor B
21. PT. Pundi Lahan Khatulistiwa	Kec. Sungai Ambawang
22. PT. Panra Agro Mas	Kec. Sungai Raya
23. PT. Prakarsa Tani Sejati	Kec. Sungai Raya
24. PT. Agro Alam Nusantara	Kec. Rasau Jaya
25. PT. Bina Agro Berkembang	Kec. Kubu
26. PT. Cipta Tumbuh Berbuah	Kec. Kubu
27. PT. Bumi Alam Sentosa	Kec. Rasau Jaya

Dari 27 perusahaan perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa perusahaan kelapa sawit yang mempekerjakan anak di perusahaan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut antara lain : PT Sintang Raya yang mempekerjakan anak sebanyak 32 orang, umur rata-rata 13 tahun sampai dengan 15 tahun. PT. Kandelia Alam yang mempekerjakan anak sebanyak 4 orang, umur rata-rata 12 tahun sampai dengan 15 tahun dan PT. GAN yang mempekerjakan anak sebanyak 2 orang, rata-rata berumur 13 tahun.

Dari research yang peneliti lakukan, semua anak-anak tersebut semua tidak bersekolah lagi dan anak tersebut hanya bekerja sebagai pekerja lepas atau harian serta tidak mempunyai ikatan perjanjian kerja antara anak yang diwakili pihak orang tua dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, kondisi anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semuanya tidak terpenuhi. Artinya ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dalam konteks hukum.

Kondisi ini tentu harus mendapat perlindungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja, karena usia anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya duduk dibangku sekolah. Pemerintah daerah tampaknya kurang memperhatikan secara serius terhadap pekerja anak ini. Hal ini, dapat dilihat dari tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penghentian operasional perusahaan ataupun pencabutan izin usaha perkebunan dan lebih jauh lagi tidak usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menarik anak-anak tersebut dari perusahaan-perusahaan perkebunan dimana anak tersebut bekerja.

Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia.

Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu. Pemerintah Kabupaten telah memiliki system perlindungan hukum pekerja anak dengan seperangkat peraturan perundang-undangan baik sebagai perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif terhadap pekerja anak dengan Disnakertrans sebagai penanggungjawab atas terlaksananya system perlindungan terhadap pekerja anak tersebut. "Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha. Larangan ini merupakan perlindungan preventif yang paling mendasar yang dengan tegas dapat menghentikan timbulnya tenaga kerja anak atau pekerja anak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak oleh pemerintah daerah, dapat dikatakan bersifat dilematis. Pada satu sisi, jika pemerintah daerah akan menjalankan program perlindungan anak tentu akan bersingungan dengan orang tua si anak, karena menyangkut persoalan ekonomi keluarga. Sementara pemerintah tentu tidak mampu secara langsung memberikan kesejahteraan hidup pada orang tua-orang tua yang merelakan anaknya untuk bekerja, meskipun harus meninggalkan bangku sekola, bermain dan berkreasi.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak –Anak Bekerja Diperkebunan Kelapa Sawit.**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.

Pekerja Anak sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mereka tersebar diberbagai negara di dunia, terutama dinegara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengungkapkan anak-anak usia 5-7 tahun masih banyak yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya. Di Indonesia, hasil pendataan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1,7 anak-anak adalah pekerja. Pekerja anak ditemukan hampir di semua kabupaten," ujar Patrick Daru, Chief Technical Adviser of the ILO Education and Skill Program.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Harian Kompas Loc Cit

Banyaknya pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah kabupaten kubu raya tentu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Adapun faktor-faktor yang dapat diinventarisir adalah :

### **1. Faktor Kemiskinan dan Ekonomi**

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua sebagai buruh atau pekerja di perkebunan kelapa sawit yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari.

### **2. Faktor Sosial Budaya**

Areal perkebunan kelapa sawit pada umumnya terletak diwilayah-wilayah pinggiran dalam suatu daerah kabupaten dan secara spesifik terletak diantara pedesaan-pedesaan. Kultur dan pola pikir masyarakat pedesaan tentu jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pada masyarakat pedesaan masih terekam pola pikir yang memandang bahwa anak khususnya anak laki-laki sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan

budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

### **3. Faktor Pendidikan.**

Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, memiliki orang tua yang tingkat pendidikannya sangat rendah, bahkan menurut peneliti ada orang tua yang sama sekali tidak menyentuh bangku sekolah. Akibat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mengeyam pendidik, maka pola pikir orang-orang tua tersebut juga menjadi sangat dangkal. Mereka beranggapan untuk apa anak-anak tersebut bersekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya juga untuk mencari duit. Oleh karena itu, para orang tua berpikir lebih baik bekerja sekarang untuk mencari duit dan membantu keluarga daripada dikemudian hari.

### **4. Pengawasan.**

Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai saat ini hanya memiliki 4 (empat) orang pengawas Ketenagakerjaan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang sangat minim tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kubu raya, tidak saja perusahaan perkebunan kelapa sawit tetapi juga perkebunan-perkebunan lainnya dan perusahaan pada sektor industri.

Dalam konteks hukum, menurut kerangka berpikir Lawrence M Friedman<sup>6</sup> terdapat 3 unsur dari sistem nilai hukum yang dapat terlaksananya hukum didalam masyarakat yakni : 1). Substansi. 2). Struktur. 3) Culture. 3 (tiga) unsur ini jika dilihat pada konteks pekerja anak di perusahaan perkebunan kelapa sawit maka dapat dielaborasi sebagai berikut :

Substansi; pada unsur ini yang dapat dilihat adalah aturan-aturan atau regulasi yang mengatur mengenai anak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan terhadap anak sebenarnya cukup memadai. Dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, aturan – aturan normatif untuk melindungi anak sudah terbentuk, sehingga secara substantif pemerintah tinggal melaksanakan saja apa menjadi hak-hak dan kewajiban pemerintah untuk melindungi anak dari berbagai macam kegiatan, termasuk tidak membolehkan anak untuk bekerja.

Strukture; pada unsur ini sebenarnya pemerintah daerah telah mempunyai satuan-satuan perangkat daerah yang bertugas untuk melindungi anak dari berbagai macam pekerjaan. Undang Undang 23 Tahun 2014 telah mendesentralisasikan urusan perlindungan anak dan ketengakerjaan pada pemerintah daerah. 2 (dua) badan dan satu dinas sebenarnya sudah cukup untuk menjalankan fungsi guna melindungi anak. Misalnya Badan Peremberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, , Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2004 hal 154



program yang telah dicanangkan, akan tetapi pada prakteknya kedua organisasi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Culture; pada unsur ini titik berat diletakan pada masyarakat, apakah masyarakat dapat memahami atau mengerti hukum yang berlaku atau tidak. Pada konteks pekerja anak, jelas peran penting ditujukan pada orang tua, karena orang tua yang dapat mengendalikan anak, anak ikut bekerja guna membantu kehidupan keluarga meskipun dilarang oleh hukum tetap menjadi pilihan orang tua. Sebagaimana dikatakan oleh Friedman bahwa Budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum, budaya hukum adalah sumber hukumnya.

### **3. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu raya Melihat Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit.**

Dari reseach yang penelti lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui bahwa masalah pekerja anak merupakan bagaian tersendiri dari masalah ketenagakerjaan yang ada di wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selain masalah pemutusan hubungan kerja, upah tidak sesuai UMK serta keselamatan kerja dan lain sebagainya.

Inventarisir terhadap pekerja anak telah dilakukan sampai pada pemanggilan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mempekerjakan anak. Langkah-langkah atau upaya ini sayangnya tidak bersifat berkesinambungan dan dilakukan secara insedentil saja yakni pada saat dilaksanakan pengawasan oleh

pengawasan ketenagakerjaan. langkah-langka dimaksud dapat dirinci satu persatu yakni :

**a. Pemanggilan terhadap anak dan orang tua.**

Pemanggilan terhadap anak dan orang tua untuk mengetahui latar belakang sehingga anak bekerja di perkebunan kelapa sawit dan memberikan pemahaman tentang aturan-aturan ketenagakerjaan yang tidak membolehkan anak bekerja. Langkah ini ternyata tidak efektif, karena para orang tua dan anak tetap saja mempekerja anak, karena faktor ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

**b. Pemanggilan terhadap Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.**

Pemanggilan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan mempekerjakan anak di perkebunan. Pertimbangan utama pihak perkebunan adalah membantu masyarakat setempat dalam rangka mencari nafkah dan pemenuhan kehidupan. Artinya tidak memandang berapa usia yang harus mereka terima sebagai pekerja lepas. Khusus untuk pekerja anak, pihak perkebunan tidak membuat perjanjian kerja secara khusus dengan alasan kemanusiaan tanpa memandang regulasi yang ada.

Dua langkah ini menjadi sangat sia-sia, karena tindakan-tindakan refresif dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya sama sekali tidak ada. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja, yang lebih bersifat imbaun. Kondisi ini tentu tidak menjadi efek jera bagi perusahaan untuk tetap mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari semua yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Dari 27 perusahaan perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa perusahaan kelapa sawit yang mempekerjakan anak di perusahaan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut antara lain : PT Sintang Raya yang mempekerjakan anak sebanyak 32 orang, umur rata-rata 13 tahun sampai dengan 15 tahun. PT. Kandelia Alam yang mempekerjakan anak sebanyak 4 orang, umur rata-rata 12 tahun sampai dengan 15 tahun dan PT. GAN yang mempekerjakan anak sebanyak 2 orang, rata-rata berumur 13 tahun. Dari research yang peneliti lakukan, semua anak-anak tersebut tidak bersekolah lagi dan anak tersebut hanya bekerja sebagai pekerja lepas atau harian serta tidak mempunyai ikatan perjanjian kerja antara anak yang diwakili pihak orang tua dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, kondisi anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semuanya tidak terpenuhi. Artinya ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dalam konteks hukum. Kondisi ini tentu harus mendapat perlindungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja, karena usia anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya duduk dibangku sekolah. Pemerintah daerah tampaknya kurang memperhatikan secara serius terhadap pekerja anak ini. Hal ini, dapat dilihat dari tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penghentian operasional perusahaan ataupun pencabutan izin usaha perkebunan dan lebih jauh lagi tidak usaha dari pemerintah daerah

Kabupaten Kubu Raya untuk menarik anak-anak tersebut dari perusahaan-perusahaan perkebunan dimana anak tersebut bekerja.

2. Bahwa faktor yang menyebabkan anak bekerja di perkebunan kelapa sawit adalah Faktor Kemiskinan dan Ekonomi ; Faktor Sosial Budaya; Faktor Pendidikan Pengawasan.
3. Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Pemanggilan terhadap anak dan orang tua. Pemanggilan terhadap Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Dua langkah ini menjadi sangat sia-sia, karena tindakan-tindakan refresif dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya sama sekali tidak ada. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja, yang lebih bersifat imbaun. Kondisi ini tentu tidak menjadi efek jera bagi perusahaan untuk tetap mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja.

## **B. Saran-saran**

1. Harus dilakukan upaya hukum preventif berupa pengawasan ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan upaya hukum refresif berupa tindakan-tindakan hukum nyata yang dapat memberikan efek jera bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempekerjakan anak.
2. Pemerintah daerah kabupaten kubu raya harus membuat terobosan berupa kebijakan yang dapat menarik anak-anak yang bekerja untuk kembali bersekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Benyamin Hoessein, *Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek Kelembagaan*, LAN, Jakarta 1996.
- Bhenyamin Hoessein, *Perubahan Model Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2009
- Bhenyamin Hoessein, *Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*, Makalah, Loka Karya Nasional yang diselenggarakan oleh MIPI dan APPSI, Jakarta, 2008.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Roda Inti Media, Jakarta, 2009
- Elfrianto, *Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Jurnal Madani*, Vol. 8 No.2, Juni 2007, Medan
- Gary Dessler, *Management Fundamentals A Frame Work*, (Virginia: Reston Publishing Company, 1977)
- Hessel Nogi ST, *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta 2004
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga 1994.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Koesworo, E. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta
- Junaidi, *Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia Dalam rangka Perlindungan Tenaga Kerja Dan Keselamatan Kerja*. 2012
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *"Hukum Sebagai Suatu Sistem"*, Remaja Rusdakarya, Bandung 1993

- Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009
- Oentarto Sindung Mawardi, Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Permasalahan dan Tantangan, Ceramah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Acara Diskusi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Jakarta, 27 Nopember 2002
- Phillipus M. Hadjon, "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*". Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Parson, sebagaimana disampaikan oleh Bhenyamin Hoessein dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah. Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008
- Philip Mawhod dalam Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , Metodologi Penelitian Hukum Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Riswhandha Imawan dalam Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005
- Soejamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Satijipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004
- Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap, Orasi Ilmiah, Unpad Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta 1982

- Soejono Soekanto dan Isri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers Jakarta, 2001.
- Safri Nugraha Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi , Center For Law and Good Governance Studies (CLGSFHUI) Jakarta, 2007
- S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Sodjuangan Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten, Kota, Disertasi universitas Indonesia, Jakarta, 2002
- Sendjun Manulang,. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum administrasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006
- Suherman.. Buku Saku Perkembangan Anak. Penerbit: Kedokteran EGC. 2000
- W. Riawan Tjandra, Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi. Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
- Wawan Sobari dkk, Inovasi Sebagai Referensi, Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award, Jawa Post Institut of Pro-Otonomi, Surabaya, 2004
- William N. Dunn dalam I(bnu Syamsi. Diktat kuliah Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1993

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.